

Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Aliatun Nisa^{1*}, Weni Rosdiana², Haryo Kunto Wibisono³, Nabila Septia Rosa⁴

¹⁻⁴Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding author: aliatun.22077@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan seperti ketidaktepatan data penerima bantuan, kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta belum optimalnya proses pemberdayaan dan pelatihan masyarakat dalam mendorong kemandirian ekonomi agar keluar dari kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, mengacu pada teori evaluasi dampak Samodra Wibawa yang mencakup empat indikator yaitu dampak individual, organisasional, masyarakat, serta lembaga dan sistem sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak individual masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar dan biaya pendidikan, namun belum mampu mendorong kemandirian ekonomi secara optimal serta sikap pasif dan ketergantungan. Pada aspek organisasional, terdapat kendala berupa ketidaksesuaian data, keterbatasan kewenangan desa, dan belum optimalnya pendampingan. Pada aspek masyarakat, program ini menimbulkan persepsi ketidakadilan, kecemburuan sosial, ketidaktransparanan dan kebingungan dalam mekanisme penentuan penerima bantuan. Dan aspek lembaga dan sistem sosial, sistem pendataan belum sepenuhnya sesuai dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan penguatan pendampingan, pembaruan data secara berkala, serta pengembangan pemberdayaan ekonomi produktif bagi penerima manfaat.

Kata Kunci: Evaluasi Dampak, Bantuan Sosial, PKH, Kemiskinan

Abstract

The background of this study is several issues in the implementation of the Family Hope Program, such as inaccurate beneficiary data, dependency on social assistance, and suboptimal empowerment and training efforts to promote economic independence and poverty reduction. The aim of this research is to analyze and describe the impact evaluation of PKH implementation in Kutukulon Village, Jetis District, Ponorogo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach based on Samodra Wibawa's impact evaluation theory, which consists of four indicators: individual, organizational, community, and institutional-social system impacts. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings show that the individual impact is still limited to meeting basic needs and education expenses, and has not significantly improved economic independence, while dependency tendencies remain. At the organizational level, issues include data inaccuracy, limited village authority, and suboptimal mentoring. At the community level, the program has led to perceptions of unfairness, social jealousy, lack of transparency, and confusion in targeting mechanisms. At the institutional level, the data system has not fully reflected the dynamic socio-economic conditions of society. Strengthening assistance, updating data, and developing economic empowerment programs are necessary.

Keywords: Impact Evaluation, Social Assistance, PKH, Poverty

PENDAHULUAN

Evaluasi dampak merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Warman, 2023). Melalui evaluasi dampak, pemerintah dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran setelah suatu kebijakan diimplementasikan, baik perubahan yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks kebijakan sosial, evaluasi dampak menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu menjawab permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya (Zakirin & Arifin, 2022).

Salah satu permasalahan sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 25,22 juta jiwa atau 9,03% pada Maret 2024 menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47% pada Maret 2025 (BPS, 2025). Meskipun menunjukkan tren positif, angka tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi agenda pembangunan yang memerlukan perhatian berkelanjutan (PRAKARSA, 2025).

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Ponorogo. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 9,53% pada tahun 2023 menjadi 9,11% pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 8,86% pada tahun 2025. Namun demikian, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai puluhan ribu jiwa menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, berbagai program perlindungan sosial terus dilaksanakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan mereka (Ponorogo, 2024).

Salah satu program perlindungan sosial yang menjadi instrumen utama pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sekaligus mendorong terbentuknya kemandirian keluarga penerima manfaat serta memutus rantai kemiskinan (KEMENTERIAN, 2018).

Meskipun telah berjalan selama bertahun-tahun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak PKH belum selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Permasalahan yang sering ditemukan antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, pemanfaatan bantuan yang masih berorientasi pada kebutuhan konsumtif, serta munculnya ketergantungan sebagian penerima terhadap bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya dapat diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari sejauh mana program mampu meningkatkan kesejahteraan, mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat dan memutus rantai kemiskinan (Hudang et al., 2024).

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Desa Kutukulon, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Selain itu, terdapat indikasi inclusion error dan exclusion error yang menyebabkan sebagian masyarakat yang layak menerima bantuan tidak memperoleh manfaat program, sementara beberapa keluarga yang dinilai telah memiliki kondisi ekonomi lebih baik masih tercatat sebagai penerima. Di sisi lain, sebagian penerima memanfaatkan

bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya pendidikan, sehingga dampak program terhadap peningkatan kemandirian ekonomi keluarga dalam upaya memutus rantai kemiskinan belum terlihat secara optimal.

Penelitian mengenai Program Keluarga Harapan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian lebih berfokus pada implementasi program, efektivitas penyaluran bantuan, atau tingkat keberhasilan program dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian yang secara khusus mengevaluasi dampak PKH berdasarkan indikator dampak individual, organisasional, masyarakat, serta sistem dan lembaga sosial sebagaimana dikemukakan oleh Samodra Wibawa masih relatif terbatas, khususnya pada konteks masyarakat semi-perdesaan seperti Desa Kutukulon. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji dampak PKH secara lebih komprehensif melalui perspektif evaluasi dampak kebijakan. Penelitian ini secara kritis menyoroti ketidaksesuaian antara tujuan jangka panjang PKH dan realitas lapangan

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Desa Kutukulon Kabupaten Ponorogo berdasarkan indikator evaluasi dampak Samodra Wibawa yang meliputi dampak individual, dampak organisasional, dampak masyarakat, serta dampak terhadap sistem dan lembaga sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan keluarga miskin berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2020). Penelitian dilaksanakan di Desa Kutukulon, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan wilayah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, pemanfaatan bantuan yang cenderung konsumtif, serta munculnya ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pendamping PKH, Kasi Kesejahteraan Desa Kutukulon, keluarga penerima manfaat (KPM), serta masyarakat non-penerima bantuan yang dipilih secara purposive. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Sofwatillah et al., 2024). Untuk menjamin kredibilitas temuan penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Wiyanda Vera et al, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Informan penelitian terdiri atas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kasi Kesejahteraan Desa, keluarga penerima manfaat (KPM), serta masyarakat non - penerima bantuan. Pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil analisis terhadap temuan

lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang di lapangan. Penelitian ini menghubungkan hasil temuan dengan indikator teori yang telah ditentukan yaitu evaluasi dampak Samodra Wibawa yang terdiri dari empat indikator yakni dampak individual, dampak organisasional, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap sistem dan lembaga sosial. Setelah melakukan penelitian di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ditemukan fakta yang terjadi sebagai berikut:

1. Dampak Individual

Berdasarkan hasil penelitian, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak pada aspek individual penerima manfaat yang meliputi aspek ekonomi, psikologis, dan sosial personal. Dari aspek ekonomi, bantuan PKH berkontribusi dalam membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, terutama kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang diterima membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga sehingga kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik. Meskipun demikian, peningkatan kondisi ekonomi yang terjadi belum bersifat signifikan karena bantuan lebih banyak digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan kebutuhan dasar dibandingkan sebagai sarana peningkatan pendapatan atau pengembangan usaha produktif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak ekonomi PKH masih berada pada tahap perlindungan sosial (*social protection*), yaitu membantu keluarga miskin mempertahankan kondisi hidup yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar pendidikan. Namun demikian, dampak yang dihasilkan masih lebih dominan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek sehingga tujuan jangka panjang program untuk meningkatkan taraf hidup dan mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat guna memutus rantai belum sepenuhnya tercapai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nikita Vidiana Senduk (2021) yang menunjukkan bahwa bantuan PKH cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek sehingga dampak pemberdayaan ekonomi keluarga masih relatif terbatas .

Dari aspek psikologis, sebagian besar keluarga penerima manfaat mengaku terbantu dengan adanya bantuan PKH karena dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga. Bantuan tersebut memberikan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama ketika kondisi ekonomi rumah tangga berada pada situasi yang tidak stabil. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan ketergantungan psikologis pada sebagian penerima manfaat. Bantuan PKH tidak lagi dipandang semata sebagai bantuan sosial sementara, tetapi mulai dianggap sebagai sumber pemenuhan kebutuhan yang diharapkan terus diterima. Kondisi tersebut terlihat dari munculnya kekhawatiran ketika bantuan dihentikan serta adanya persepsi bahwa bantuan merupakan hak yang harus dipertahankan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses transformasi menuju kemandirian penerima manfaat guna memutus rantai kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan.

Pada aspek sosial personal, bantuan PKH berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola perilaku penerima manfaat masih berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan saat ini dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan menuju aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Sebagian besar bantuan masih digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga sehingga manfaat yang dirasakan lebih banyak bersifat jangka pendek. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan sosial personal yang terjadi masih terbatas pada peningkatan kemampuan bertahan hidup, belum sampai pada peningkatan kapasitas yang mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep dampak individual Samodra Wibawa yang menekankan perubahan pada kondisi individu sebagai akibat pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, perubahan yang terjadi terlihat pada meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Namun, perubahan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kapasitas ekonomi, kemandirian, maupun perubahan perilaku yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial secara berkelanjutan.

2. Dampak Organisasional

Berdasarkan hasil penelitian, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan perubahan pada aspek organisasional, terutama dalam struktur pelaksanaan program, sistem pendataan, koordinasi antar lembaga, pendampingan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta sistem pelaporan. Sebelum pelaksanaan PKH berlangsung secara terstruktur, mekanisme bantuan sosial di tingkat desa cenderung berjalan secara sederhana dan sistem pendataan belum terintegrasi melalui SIKS-NG. Setelah pelaksanaan PKH, terdapat pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah desa, pendamping PKH, Dinas Sosial, satuan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas organisasi dalam pelaksanaan program melalui koordinasi yang lebih sistematis dibandingkan sebelum program berjalan.

Selain itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan juga didukung oleh keberadaan pendamping PKH dan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan secara rutin. Kegiatan tersebut menjadi wadah pendamping PKH dalam menyampaikan informasi program, memantau kepatuhan penerima manfaat terhadap komitmen program, serta menjembatani komunikasi antara penerima manfaat dan pelaksana program. Di samping itu, sistem pendataan dan pelaporan telah memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan sistem yang terintegrasi sehingga proses administrasi dan pelaporan menjadi lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan organisasional tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Data penerima bantuan masih ditemukan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, sementara pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan dalam menentukan maupun mengubah data penerima bantuan karena sebagian besar keputusan ditetapkan melalui sistem terpusat. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait ketepatan sasaran penerima bantuan.

Selain itu, fungsi pendampingan yang dijalankan melalui P2K2 masih cenderung berfokus pada aspek administratif, seperti penyampaian informasi program, pencairan bantuan, serta penyelesaian berbagai permasalahan teknis yang dihadapi penerima manfaat. Kegiatan pendampingan belum berkembang secara optimal sebagai sarana pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, keterampilan, maupun kemandirian keluarga penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa peran

pendamping sebagai fasilitator perubahan sosial dan ekonomi belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Tidak adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan menyebabkan bantuan yang diberikan tidak berkembang menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan.

Dalam perspektif Samodra Wibawa, dampak organisasional terlihat dari adanya perubahan struktur kerja, mekanisme koordinasi, serta sistem pelaksanaan program yang lebih teratur dan terintegrasi. Akan tetapi, perubahan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan efektivitas organisasi yang optimal karena masih terdapat kesenjangan antara sistem yang dibangun dengan kondisi masyarakat di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saragi, Batoebara, dan Arma (2021) yang menemukan bahwa permasalahan verifikasi data dan penetapan penerima manfaat masih menjadi kendala dalam pelaksanaan PKH. Selain itu, penelitian Nova, Priyadi, dan Purnaweni (2024) juga menunjukkan bahwa kendala pendataan dan koordinasi antar pelaksana program masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH.

3. Dampak Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya memengaruhi keluarga penerima manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kutukulon. Dampak tersebut terlihat melalui persepsi masyarakat terhadap ketepatan sasaran bantuan, tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme program, serta dinamika interaksi sosial yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan kebijakan.

Sebagian masyarakat menilai bahwa PKH memberikan manfaat nyata dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya persepsi bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa masyarakat menilai masih terdapat keluarga yang dianggap layak menerima bantuan tetapi tidak memperoleh manfaat program, sementara sebagian penerima bantuan dinilai memiliki kondisi ekonomi yang relatif lebih baik. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan dan memunculkan kritik terhadap proses penentuan penerima bantuan. Bagi sebagian masyarakat, ketepatan sasaran menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat penerimaan dan kepercayaan terhadap program bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme penetapan penerima manfaat maupun alasan penghentian bantuan. Beberapa masyarakat mengaku tidak mengetahui secara jelas kriteria penerima bantuan serta alasan perubahan status kepesertaan dalam program. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan munculnya kebingungan, ketidakpuasan, bahkan kekecewaan ketika bantuan dihentikan tanpa informasi yang dianggap memadai oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dan komunikasi program masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan PKH di tingkat Masyarakat.

Pelaksanaan PKH juga memunculkan dinamika dalam hubungan sosial masyarakat. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap yang positif terhadap keberadaan program karena dianggap membantu keluarga miskin yang membutuhkan. Namun demikian, terdapat pula rasa iri sosial dan kecemburuan yang muncul akibat perbedaan status penerimaan bantuan, terutama ketika masyarakat menilai terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi penerima dan kriteria yang seharusnya berlaku. Meskipun tidak

menimbulkan konflik sosial yang terbuka, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial dapat memengaruhi pola interaksi sosial dan persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi bantuan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak PKH pada tingkat masyarakat tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi yang diterima keluarga miskin, tetapi juga berkaitan dengan persepsi keadilan, kepercayaan masyarakat terhadap program, serta hubungan sosial yang terbentuk di lingkungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui sistem perlindungan sosial yang tepat sasaran. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan tersebut masih menghadapi tantangan berupa permasalahan ketepatan sasaran, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, serta munculnya persepsi ketidakadilan akibat inclusion error dan exclusion error.

Dalam perspektif Samodra Wibawa, dampak masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan tidak selalu bersifat positif, tetapi juga dapat memunculkan konsekuensi sosial yang memengaruhi persepsi, sikap, dan hubungan sosial masyarakat terhadap program pemerintah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Zakirin dan Arifin yang menunjukkan bahwa permasalahan inclusion error dan exclusion error dalam pelaksanaan PKH dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan program dan efektivitas penyaluran bantuan sosial.

4. Dampak terhadap Sistem dan Lembaga Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah mendorong perubahan pada sistem dan lembaga sosial yang mendukung pelaksanaan bantuan sosial di Desa Kutukulon. Perubahan tersebut terlihat pada sistem pendataan, mekanisme penentuan penerima bantuan, distribusi bantuan, hubungan masyarakat dengan lembaga pelaksana, serta mekanisme evaluasi program. Kehadiran sistem bantuan sosial yang lebih terintegrasi yakni SIKS-NG menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan standardisasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin.

Sebelum penerapan sistem bantuan sosial yang terintegrasi, proses pendataan penerima bantuan lebih banyak didasarkan pada informasi lokal dan pengetahuan aparat desa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Setelah pelaksanaan PKH, sistem pendataan dilakukan melalui mekanisme terpusat yang memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), serta pengelompokan desil kesejahteraan sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penguatan sistem administrasi bantuan sosial yang lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang lebih terstruktur tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara akurat. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Beberapa masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan tidak memperoleh manfaat program, sementara sebagian masyarakat yang kondisi ekonominya telah mengalami perubahan masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan masih terjadinya exclusion error dan inclusion error dalam pelaksanaan program.

Selain itu, pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan perubahan maupun penyesuaian data penerima bantuan karena sebagian besar keputusan ditentukan melalui sistem yang terpusat. Akibatnya, pemerintah desa tidak dapat secara langsung menyesuaikan data dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Keterbatasan fleksibilitas sistem tersebut menyebabkan proses pembaruan data sering kali tidak berjalan secepat perubahan kondisi masyarakat di lapangan.

Perubahan sistem juga memengaruhi hubungan antara masyarakat dan lembaga pelaksana program. Jika sebelumnya hubungan masyarakat dengan pemerintah desa lebih banyak dibangun melalui interaksi sosial secara langsung, pelaksanaan bantuan sosial saat ini lebih dipengaruhi oleh mekanisme administrasi dan sistem pendataan yang terpusat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mulai meragukan akurasi sistem penentuan penerima bantuan serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap proses distribusi bantuan sosial. Ketika masyarakat menemukan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil penerima bantuan, persepsi terhadap keadilan program juga turut terpengaruh.

Berdasarkan perspektif Samodra Wibawa, dampak terhadap sistem dan lembaga sosial dapat dilihat dari perubahan tata kelola, mekanisme administrasi, serta hubungan kelembagaan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, PKH telah berhasil memperkuat sistem administrasi dan tata kelola bantuan sosial melalui penggunaan sistem data terintegrasi dan mekanisme distribusi yang lebih terstandar. Akan tetapi, sistem tersebut belum sepenuhnya mampu memastikan ketepatan sasaran serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas sistem dalam mengelola dinamika sosial dan menjamin distribusi bantuan yang adil masih perlu diperkuat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hani Dea Nova, Budi Puspo Priyadi, dan Hartuti Purnaweni (2024) yang menemukan bahwa permasalahan akurasi data dan koordinasi antar pelaksana program masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kutukulon Kabupaten Ponorogo memberikan dampak pada aspek individual, organisasional, masyarakat, serta sistem dan lembaga sosial.

1. Dampak individual, PKH berkontribusi dalam membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pendidikan dan kebutuhan rumah tangga, sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Namun, peningkatan kesejahteraan yang terjadi masih cenderung bersifat jangka pendek karena bantuan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kondisi tersebut turut mendorong munculnya ketergantungan dan sikap pasif pada sebagian penerima manfaat yang ditunjukkan melalui kekhawatiran ketika bantuan dihentikan serta munculnya persepsi bahwa bantuan merupakan hak yang harus terus diterima. Dengan demikian, dampak individual PKH mencerminkan bahwa program telah mampu memberikan dampak langsung (*direct impact*) dalam pemenuhan kebutuhan dasar, namun belum sepenuhnya menghasilkan dampak tidak langsung (*indirect impact*) berupa kemandirian ekonomi, perubahan perilaku produktif, serta penguatan posisi sosial individu secara berkelanjutan guna keluar dari kemiskinan.
2. Dampak organisasional, PKH telah mendorong terbentuknya sistem pelaksanaan yang lebih terstruktur melalui koordinasi antar lembaga, penggunaan sistem pendataan

terintegrasi melalui SIKS-NG, serta pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Akan tetapi, fungsi pendampingan masih lebih banyak berorientasi pada aspek administratif dan belum berkembang secara optimal sebagai sarana pemberdayaan, pelatihan dan pembelajaran yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi serta kemandirian keluarga penerima manfaat guna keluar dari kemiskinan.

3. Dampak Terhadap masyarakat, PKH memberikan dampak yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, program mampu membantu sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi namun masih menimbulkan persepsi ketidakadilan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, serta kecemburuan sosial yang dipengaruhi oleh permasalahan ketepatan sasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak yang muncul tidak hanya bersifat positif, tetapi juga mencakup dampak tidak diinginkan (*unintended impact*) yang berpotensi melemahkan kohesi sosial.
4. Dampak Terhadap sistem dan lembaga sosial, PKH telah mendorong terbentuknya sistem bantuan sosial yang lebih terstruktur melalui penggunaan DTSEN dan sistem desil kesejahteraan terpusat (SINK-NG). Namun demikian, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil masyarakat, keterbatasan fleksibilitas sistem, serta menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap akurasi penyaluran bantuan. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas sosial dan memastikan distribusi sumber daya yang adil sehingga menunjukkan bahwa kapasitas sistem dalam mengelola dinamika sosial masih perlu diperkuat.

Dalam perspektif teori dampak kebijakan menurut Samodra Wibawa, temuan ini menunjukkan bahwa PKH di Desa Kutukulon masih didominasi oleh dampak langsung (*direct impact*), yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, sementara dampak tidak langsung (*indirect impact*) berupa kemandirian ekonomi, perubahan perilaku produktif, serta penguatan sistem sosial belum berkembang secara optimal. Selain itu, program juga memunculkan dampak tidak diinginkan (*unintended impact*), seperti ketergantungan dan dinamika sosial yang berpotensi melemahkan kohesi masyarakat. Secara keseluruhan, PKH telah berkontribusi dalam mencapai tujuan program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan serta kesehatan. Akan tetapi, tujuan jangka panjang program untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, mendorong kemandirian, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Temuan mengenai tingginya ketergantungan penerima manfaat, dominannya penggunaan bantuan untuk kebutuhan konsumtif, belum optimalnya fungsi pemberdayaan, pelatihan dan literasi keuangan dalam kegiatan pendampingan, serta masih terjadinya permasalahan ketepatan sasaran menunjukkan bahwa dampak PKH di Desa Kutukulon masih lebih dominan pada pencapaian tujuan jangka pendek yaitu berupa pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sedangkan tujuan jangka panjang yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi, perubahan perilaku penerima manfaat dan memutus rantai kemiskinan belum sepenuhnya tercapai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dampak Individual: Perlu penguatan pemberdayaan KPM melalui pelatihan keterampilan dan literasi keuangan berkelanjutan yang diarahkan pada pengelolaan bantuan secara produktif, seperti perencanaan pengeluaran, penentuan prioritas, tabungan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Pendampingan juga harus dilakukan secara kontinu agar bantuan tidak hanya dikonsumsi, tetapi dapat dialihkan menjadi modal usaha atau investasi produktif. Selain itu, perlu penanaman pemahaman bahwa PKH bersifat sementara sebagai stimulus, disertai penerapan prinsip graduasi untuk mendorong kemandirian ekonomi KPM.
2. Dampak Organisasional: Fungsi pendamping PKH perlu diperkuat dari sekadar pelaksana administratif menjadi fasilitator pemberdayaan pelatihan dan pembelajaran. Kegiatan P2K2 harus dioptimalkan sebagai sarana edukasi, pelatihan keterampilan, dan penguatan kapasitas ekonomi KPM. Pemerintah desa juga perlu dilibatkan lebih aktif dalam validasi dan pembaruan data agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi aktual.
3. Dampak Masyarakat: Diperlukan peningkatan transparansi dan sosialisasi terkait mekanisme penentuan penerima bantuan, termasuk kriteria, proses seleksi, dan alasan pemberhentian bantuan untuk mengurangi kesalahpahaman dan persepsi ketidakadilan. Selain itu, pendekatan partisipatif perlu diperkuat dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan validasi data secara terbatas guna menjaga keadilan serta kohesi sosial.
4. Dampak Lembaga dan Sistem Sosial: Perlu pembaruan data secara dinamis berbasis kondisi sosial ekonomi aktual untuk meminimalisir inclusion dan exclusion error. Sistem pendataan juga perlu lebih komprehensif dengan tidak hanya berbasis aset, tetapi juga pendapatan dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Integrasi data pusat dan lokal perlu diperkuat, serta PKH diintegrasikan dengan program ekonomi lokal dan pemberdayaan agar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Referensi

- BPS. (2025). *Presentasi Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html?.com>
- Hudang, A. K., Hariyanto, T., & Handoyo, R. D. (2024). Does Conditional Cash Transfer Deliver? the Indonesian Evidence on Pkh. In *Business: Theory and Practice* (Vol. 25, Issue 2, pp. 447–457). <https://doi.org/10.3846/btp.2024.13865>
- KEMENTERIAN, S. (2018). *PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN*. 1–35. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>
- Ponorogo, B. (2024). *Profil Kemiskinan diponorogo*. 2024. https://ponorogokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/05/69/profil-kemiskinan-di-kabupaten-ponorogo-maret-2024.html?utm_com=
- PRAKARSA, T. (2025). *Ukuran Kemiskinan Bukan Sekadar Pengeluaran! Kritik Pedas The Prakarsa untuk BPS*. 2025. https://theprakarsa.org/ukuran-kemiskinan-bukan-sekadar-pengeluaran-kritik-pedas-the-prakarsa-untuk-bps/?utm_com
- Sofwatillah, Risnita, Syahrani Jailani, & Arestya Saksitha. (2024). TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 80–91.

- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Warman, et al. (2023). *Konsep Umum Evaluasi Kebijakan* (p. 8).
<https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/impian/article/view/2912>
- Wiyanda Vera Nurfajriani², Muhammad Wahyu Ilhami¹Arivan Mahendra³, Rusdy Abdullah Sirodj³, M. W. A. (2024). *View of Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.pdf* (pp. 1–8). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 256–271.